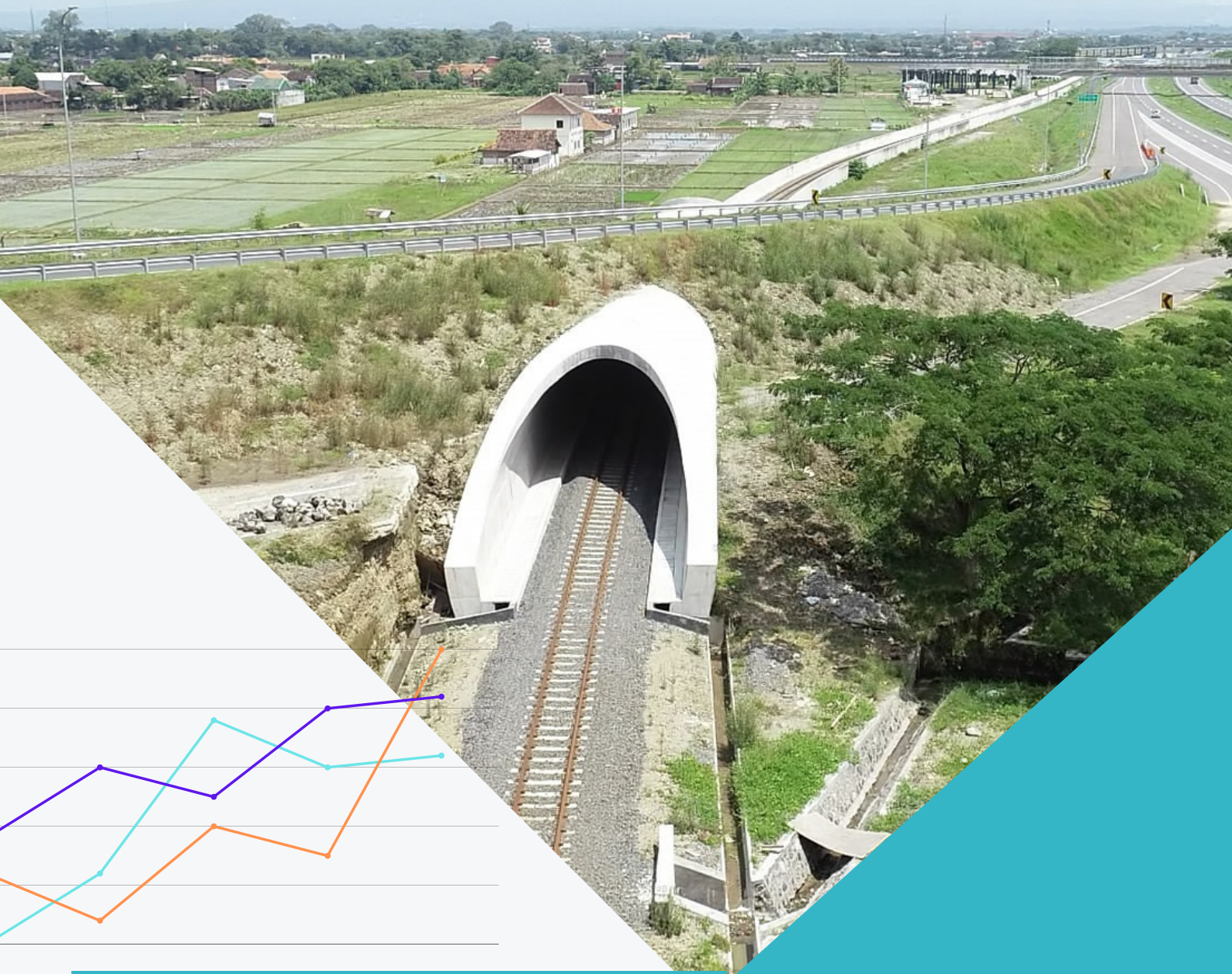




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



# **PERJANJIAN KINERJA**

## **DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN**

### **TAHUN 2021**





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. HERU WISNU WIBOWO, M.Sc**  
Jabatan : Direktur Prasarana Perkeretaapian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. ZULFIKRI, M.Sc.,DEA**  
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua,

Ir. ZULFIKRI, M.Sc., DEA  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19620709 199203 1 002

Pihak Pertama,

Ir. HERU WISNU WIBOWO, M.Sc  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650710 199003 1 002

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021 dapat terselesaikan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021 merupakan pemenuhan terhadap amanat Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai salah satu unit organisasi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Perkeretaapian berusaha menjadi instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disusun Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2021 yang merupakan proses penting agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya melalui indikator – indikator kinerja yang direncanakan sehingga akuntabilitas kinerja dapat lebih mudah ditingkatkan.

Dengan telah disusunnya Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021, diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian semakin terarah menuju terwujudnya *Good Governance*.

Jakarta, 14 Januari 2021

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN   
DITJEN PERKERETAAPIAN



**HERU WISNU WIBOWO**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650710 199003 1 002

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I – 1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I – 1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	I – 2
1.3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .....	I – 2
1.4. Struktur Organisasi .....	I – 4
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN</b> .....	<b>II – 1</b>
2.1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	II – 1
2.2. Arah Kebijakan dan Strategis Ditjen Perkeretaapian .....	II – 2
2.3. Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode 2020-2024 .....	II - 3
<b>BAB III REVISI RENCANA KINERJA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020</b> .....	<b>III – 1</b>
3.1. Sasaran dan Indikator Kinerja .....	III – 1
3.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	III – 2
3.3. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021 .....	III – 3
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>IV – 1</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
<b>LAMPIRAN A</b> : Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2021	
<b>LAMPIRAN B</b> : Rencana Aksi Atas Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2021	
<b>LAMPIRAN C</b> : Lampiran Rencana Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2021	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai lembaga penunjang penggerak pembangunan nasional mempunyai peranan penting dalam pelayanan jasa transportasi di bidang perkeretaapian. Pembangunan bidang transportasi perkeretaapian akan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi ini berperan penting dalam kegiatan baik angkutan penumpang maupun distribusi barang dan jasa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan komponen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Bidang Prasarana Perkeretaapian periode 2020-2024 maka wajib menyusun Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada target Indikator Kinerja Utama yang berbabis *output /outcome* serta Visi dan Misi Ditjen Perkeretaapian sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perhubungan.

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2021 di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai selama Tahun 2021. Perjanjian Kinerja ini selanjutnya akan ditetapkan sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2019 dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pendanaan, sumber daya manusia, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2021 ini dimaksudkan untuk menetapkan target pencapaian terhadap sasaran pembangunan perkeretaapian yang pada akhirnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menetapkan indikator-indikator kinerja yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan maupun realisasi dari kegiatan – kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya.

## **1.3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang didalamnya terdapat unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara legalitas kedudukannya dibawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi

kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai kewenangan antara lain:

- a. Rehabilitasi/perawatan prasarana perkeretaapian;
- b. Pembangunan prasarana perkeretaapian dan pendukung operasional kereta api;
- c. Pembinaan, monitoring evaluasi dan pemeriksaan kualitas prasarana perkeretaapian;
- d. Sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian;
- e. Standarisasi material, system, desain di bidang prasarana perkeretaapian.

## 1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri dari :

### 1. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah 1 yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan



- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah I;

Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalan rel dan tanah kereta api, penyusunan penetapan rancang bangun, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan perawatan, ijin teknis pemanfaatan, penempatan dan/atau penyimpanan peralatan suku cadang, jasa konsultansi dan konstruksi, perhitungan biaya perawatan, pengelolaan data dan pengembangan informasi, pemeriksaan, serta program dan dokumentasi di bidang jalan rel dan tanah kereta api di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

- b. Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah I.

Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jembatan, bangunan, dan stasiun kereta api, pemeriksaan jembatan dan bangunan kereta api, pelaksanaan pembangunan, perawatan, pengoperasian, dan ijin teknis pemanfaatan, perhitungan biaya perawatan, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang, pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan

kerja, pengelolaan data dan pengembangan informasi, serta program dan dokumentasi di bidang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

## **2. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II**

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan KA Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah II

Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalan rel dan tanah kereta api, penyusunan penetapan rancang bangun, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan perawatan, ijin teknis pemanfaatan, penempatan dan/atau penyimpanan peralatan suku cadang, jasa konsultasi dan konstruksi, perhitungan biaya perawatan, pengelolaan data dan pengembangan informasi, pemeriksaan, serta program dan dokumentasi di bidang jalan rel dan tanah kereta api di wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

- b. Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah II

Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jembatan, bangunan, dan stasiun kereta api, pemeriksaan jembatan dan bangunan kereta api, pelaksanaan pembangunan, perawatan, pengoperasian, dan ijin teknis pemanfaatan, perhitungan biaya perawatan, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang, pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengelolaan data dan pengembangan informasi, serta program dan dokumentasi di bidang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api di wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

### 3. **Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api**

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api terdiri atas:

a. Seksi Persinyalan;

Seksi Persinyalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembangunan, perawatan dan pengoperasian persinyalan, peralatan suku cadang dan logistik persinyalan, perhitungan dan evaluasi biayapembangunan, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang dan logistik persinyalan, pemeriksaan persinyalan, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengesahan kualitas material baru persinyalan, pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi persinyalan, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang persinyalan.

b. Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan.

Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembangunan, perawatan, pemeriksaan, ijin teknis, pengoperasian, dan pemanfaatan peralatan, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang, perhitungan dan evaluasi biaya pembangunan, penyusunan penetapan rancang bangun, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengesahan kualitas material baru, pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi, serta program dan dokumentasi di bidang telekomunikasi dan pelistrikan.

#### **4. Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api**

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api terdiri atas:

- a. Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I  
Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan pengawasan pengujian, pengesahan hasil uji komponen baru, penyusunan kebutuhan, pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian, serta pengelolaan data dan pengembangan informasi kelaikan di bidang jalur dan bangunan serta stasiun kereta api, pengawasan dan

monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyiapan bahan program dan dokumentasi kelaikan jalur dan bangunan kereta api wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusatenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

b. **Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II**

Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan pengawasan pengujian, pengesahan hasil uji komponen baru, penyusunan kebutuhan, pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian, serta pengelolaan data dan pengembangan informasi kelaikan di bidang jalur dan bangunan serta stasiun kereta api, pengawasan dan monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyiapan bahan program dan dokumentasi kelaikan jalur dan bangunan kereta api wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

**5. Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api**

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api; dan
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api terdiri atas:

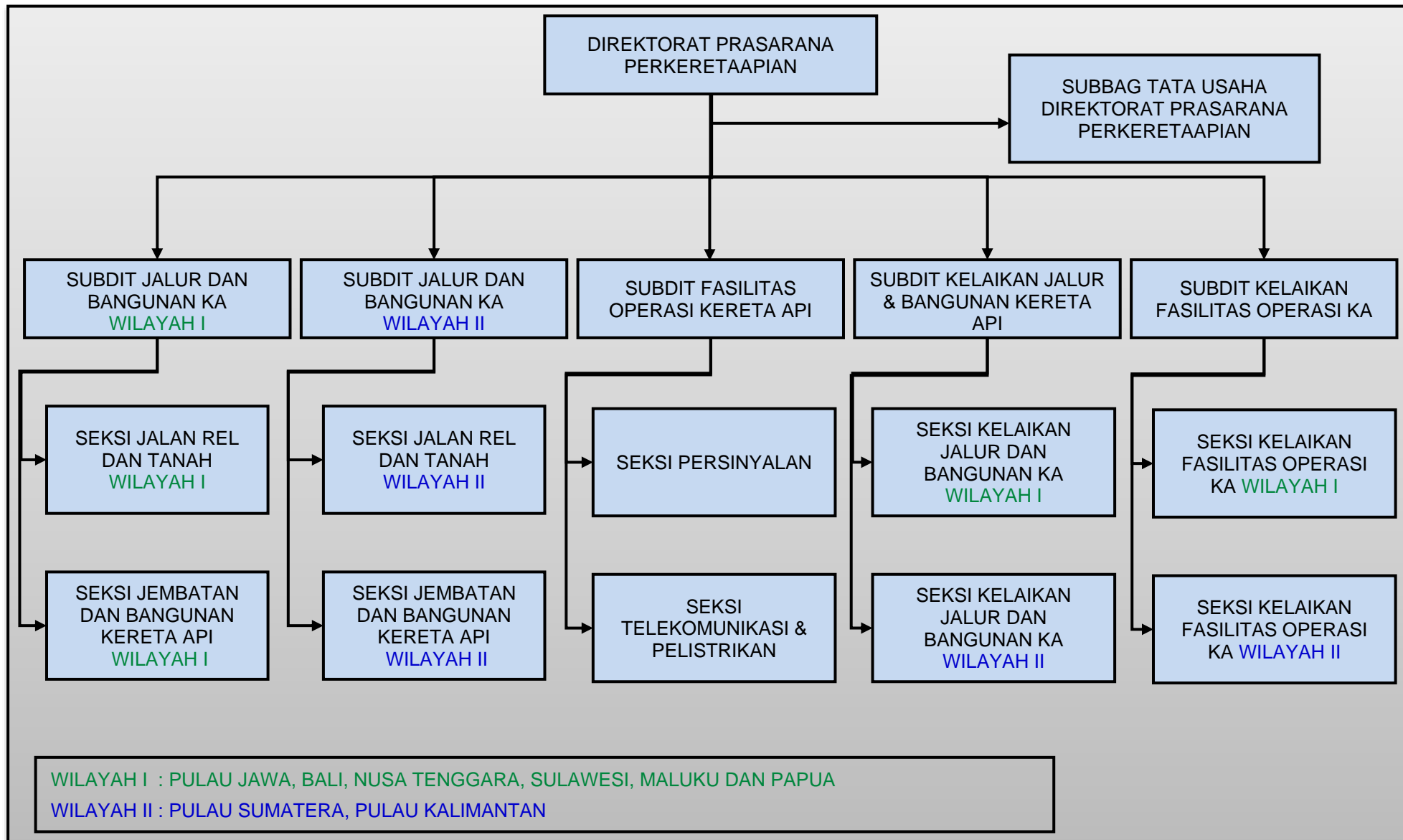
- a. Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah I;  
Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan pengawasan pengujian, pengesahan hasil uji komponen baru, penyusunan kebutuhan, pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian, serta pengelolaan data dan pengembangan informasi kelaikan di bidang fasilitas operasi kereta api, pengawasan dan monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyiapan bahan program dan dokumentasi kelaikan fasilitas operasi kereta api wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- b. Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah II.  
Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan pengawasan pengujian, pengesahan hasil uji komponen baru, penyusunan kebutuhan, pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian, serta pengelolaan data dan pengembangan informasi kelaikan di bidang fasilitas operasi kereta api, pengawasan dan monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyiapan bahan



program dan dokumentasi kelaikan fasilitas operasi kereta api wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

#### **6. Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian

## **BAB II**

# **PERENCANAAN STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN**

### **2.1. VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan mandat, penugasan, isu strategis dan perkembangan lingkungan strategis, dan kondisi dari perkeretaapian pada saat ini, maka untuk perumusan arah kebijakan pembangunan transportasi perkeretaapian 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah:

“Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupaya mewujudkan Perkeretaapian yang Handal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi dan Terjangkau guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Dalam rangka perwujudan visi tersebut, maka dirumuskan sejumlah misi yang akan dilaksanakan (mission to be accomplished) oleh Ditjen Perkeretaapian pada periode 2020-2024, yakni: Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif;
3. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam menyelenggarakan perkeretaapian nasional pada periode 2020-2024 menetapkan tujuan yang terdiri dari 3 butir sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi;
2. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal;
3. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal.

## **2.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan sejumlah arah kebijakan dan strategi pencapaian yang harus terlaksana dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah:

- a. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota dan perkotaan.
- b. Reaktifasi jalur kereta api non operasi.
- c. Pembangunan akses kereta api menuju pelabuhan dan bandara.

2. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah:

- a. Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting;
- b. Penerapan teknologi baru perkeretaapian;
- c. Peningkatan kinerja layanan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis

3. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal.  
Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal adalah Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal adalah:
  - a. Sertifikasi SDM Perkeretaapian.
  - b. Sertifikasi sarana perkeretaapian.
  - c. Sertifikasi prasarana perkeretaapian.
  - d. Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian.
  - e. Pemasangan perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (SKKO).
  - f. Pemenuhan kebutuhan IMO.
  - g. Penyusunan pedoman
  - h. identifikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana.
  - i. Penyusunan prosedur tindak lanjut akibat kecelakaan.
  - j. Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut diatas, pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki satu program yaitu Program Pengelolaan dan PenyelenggaraanTransportasi Perkeretaapian dan lima kegiatan yang terdiri dari:

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian.
2. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
3. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api.

### **2.3. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN PERIODE 2020-2024**

Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tugas dan fungsi melaksanakan Rencana Strategis sebagai berikut :

**Tabel II.2**

Target Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode Tahun 2020-2024

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA					TOTAL
					2020	2021	2022	2023	2024	
SK P1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK P1	Jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api	Lokasi	35	39	39	39	41	41
SK P2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK P2.1	Persentase Pengoperasian jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	82,84	84,97	87,1	89,94	94	94
		IKK P2.2	Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Perkeretaapian	Unit	0	0	21	-	-	21
		IKK P2.3	Jumlah Peningkatan Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian	Unit	0	0	4	-	-	4
SK P3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	IKK P3.1	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Km'sp	195	60	170	150	200	759
		IKK P3.2	Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat	150	150	180	200	215	895
		IKK P3.3	Jumlah Rumusan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	Dokumen	18	12	12	10	11	63

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA					TOTAL
					2020	2021	2022	2023	2024	
		IKK P3.4	Persentase Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
SK P4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapain	IKK P4.1	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	1.428.728.000	1.739.440.000	1.913.3884.000	2.104.722.400	2.315.194.640	9.501.469.040
		IKK P4.2	Persentase Penyerapan Anggaran	%	94	100	100	100	100	100

# BAB III RENCANA KINERJA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2021

## 3.1. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2021, sesuai dengan cascading Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I s.d Unit Kerja Eselon III Mandiri dan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2020-2024, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	Jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi Yang Terhubung Jalur Kereta Api
2	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung PELAYANAN Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI
		Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan Dan Telekomunikasi Perkeretaapian
		Jumlah Peningkatan Gardu Traksi Dan Laa Perkeretaapian
3	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
		Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
		Jumlah Rumusan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian
		Persentase Penetapan / Persetujuan / Perijinan Dibidang Prasarana Perkeretaapian Yang Tepat Waktu
4	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Penyerapan Anggaran
		Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian



### 3.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2021 dilakukan berdasarkan alokasi anggaran sesuai dengan DIPA nomor : SP DIPA – 022.08.1.467484/2021 dan Petunjuk Operasional Kinerja (POK) Tahun Anggaran 2021, perlu disusun Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

#### 3.2.1 Sasaran Kegiatan Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian dengan Output Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
Jumlah PKN/ PKW/Simpul Transportasi yang Terhubungan Jalur Kereta Api	Lokasi	39

#### 3.2.2 Sasaran Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung PELAYANAN Perkeretaapian dengan Output Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI	%	84,97
Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan Dan Telekomunikasi Perkeretaapian	Unit	-*
Jumlah Peningkatan Gardu Traksi Dan LAA Perkeretaapian	Unit	-**

\*Target tahun 2021 sebesar 46%

\*\* Target tahun 2021 sebesar 61%

#### 3.2.3 Sasaran Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian dengan Output Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Km'sp	180,540
Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat	205

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
Jumlah Rumusan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	Dokumen	12
Persentase Penetapan / Persetujuan / Perijinan Dibidang Prasarana Perkeretaapian Yang Tepat Waktu	%	100

**3.2.4 Sasaran Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan Output Indikator Kinerja Kegiatan adalah :**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
Persentase penyerapan anggaran (%)	%	97,89
Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	1.739.440.000

### 3.3. RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2021

Rencana Kerja Anggaran per Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Tahun 2021 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	2.985.981.962.000
2.	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	518.300.000.000
3.	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	1.442.554.958.000
4.	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	40.525.133.000
<b>Total</b>		<b>4.987.352.053.000</b>

Sedangkan perubahan anggaran per masing-masing jenis belanja tahun 2021 pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
1.	Belanja Pegawai	-
2.	Belanja Barang	1.527.844.625.000
3.	Belanja Modal	3.459.507.428.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.987.352.053.000</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Revisi Ke-II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 terdiri dari 4 (Enam) Sasaran Kegiatan dengan 10 Indikator Kinerja Kegiatan, meliputi :

Sasaran 1. Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api sebagai berikut :

Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api dengan Target 39 Lokasi

Sasaran 2. Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung PELAYANAN Perkeretaapian, dengan Indikator Kinerja Kegiatan Sebagai berikut:

- a. Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI dengan target 84,97 %
- b. Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Perkeretaapian ditargetkan mencapai 46 % dan selesai tahun 2022.
- c. Jumlah Peningkatan Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian ditargetkan mencapai 61 % dan selesai tahun 2022

Sasaran 3. Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara dengan target 180,540 Km'sp
- b. Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan target 205 Sertifikat
- c. Jumlah rumusan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian dengan target 12 Dokumen
- d. Persentase penetapan/ persetujuan/ perijinan dibidang prasarana perkeretaapian yang tepat waktu dengan target 100 %

Sasaran 4. Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

- a. Prosentase penyerapan anggaran (%) dengan target 97,89 %
- b. Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian dengan target Rp. 1.739.440.000,-

Dengan program utama di atas diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan perkeretaapian sebagaimana yang tertuang dalam Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

Demikian Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2021 yang akan dilaksanakan dan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

----- Selamat Bekerja -----

# LAMPIRAN

---

PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN  
TAHUN 2021

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api	Lokasi	39
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI	%	84,97
		Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Perkeretaapian	Unit	-
		Jumlah Peningkatan Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian	Unit	-
3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO)	Km'sp	180,54
		Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat	205
		Jumlah Rumusan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	Dokumen	12
		Persentase Penetapan/Persetujuan/Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat Waktu	%	100
4	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Penyerapan Anggaran	%	97,89
		Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian	Rupiah	1.739.440.000

**KEGIATAN**

**Program Infrastruktur Konektivitas**

- a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
- b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian
- c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian
- d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian

**Program Dukungan Manajemen**

- a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian

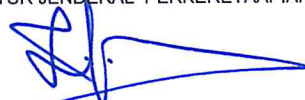
**TOTAL**

**Anggaran**

<b>Rp.</b>	<b>4.949.261.785.000</b>
Rp.	2.957.525.824.000
Rp.	518.300.000.000
Rp.	1.466.443.081.000
Rp.	6.992.880.000
<b>Rp.</b>	<b>38.090.268.000</b>
Rp.	38.090.268.000
<b>Rp.</b>	<b>4.987.352.053.000</b>

Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. ZULFIKRI, M.Sc., DEA  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19620709 199203 1 002

Jakarta, Januari 2021

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN



Ir. HERU WISNU WIBOWO, M.Sc.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650710 199003 1 002



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
UNIT KERJA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETA API

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab					
					Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12							
SK P1 Meningkatkan KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	BK P1 JUMLAH PKNPKW/ SMPUL TRANSPORTASI YANG TERHUBUNG JALUR KERETA API	Lokasi	23	PKNPKW/Simpul Transportasi yang terhubung Jalur KA Wilayah I Jemberdeki, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Cirebon, Solo Madun, Purwokerto, Malang, Tegay, Subabumi, Rengasbang, Serang, Cilegon, Proboinggo, Bandara Soetta, Bandara Adi Soemarmo, Pelabuhan TJ Prok, Pelabuhan Merak, Bamu, Kulon Progo, Pelabuhan TJ mas	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	23	-	Kasubdi Jalur dan Bangunan KA WII I					
		Lokasi	16	PKNPKW/Simpul Transportasi yang terhubung Jalur KA Wilayah II Medan, Padang, Palembang, Lampung, Binjai, Pematang Siantar, Lahat, Baturaja, Prabumulih, Tebing Tinggi, Ranis, Rengas, Bandara Kualanaram, Bandara BIM, Bandara Sultan Mahmud Baharudin, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Sungai Kertapati	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	Kasubdi Jalur dan Bangunan KA WII II					
		Rupiah	2.509.144.727.000	Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan	0	0	0	2.509.144.727.000										2.509.144.727.000	PPK Pembangunan LRT Sumsel				
		Dokumen	1	Konsultasi Supervisi Prasarana Kereta Api I Ringan Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			5.856.929.000	PPK Pembangunan LRT Sumsel				
		Sertifikat	1	Sertifikasi Laki Fungsi Bangunan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			2.080.000.000	PPK Pembangunan LRT Sumsel			
		Km	23	Pengalasan dan pemasangan SHMS untuk Jalur Elevated LRT Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23			26.841.530.000	PPK Pembangunan LRT Sumsel		
		Laporan	3	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2			383.459.000	Kasubdi Jalur dan Bangunan KA WII I		
		Laporan	3	Bimbingan Teknis, serta Koordinasi Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2			428.903.000	Kasubdi Jalur dan Bangunan KA WII II		
		Laporan	1	Bimbingan Teknis Fasilitas Operasi Kereta Api (Pelayanan, Telekomunikasi dan Instalasi Listrik)	0	0	1														467.442.000	Kasubdi Fasilitas Operasi KA	
		Laporan	12	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					1.000.193.000	Kasubdi Jalur dan Bangunan KA WII I	
		Laporan	12	Monitoring dan Evaluasi Jalur dan Bangunan KA Wilayah II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					441.091.000	Kasubdi Jalur dan Bangunan KA WII II	
		Laporan	12	Pemeriksaan dan Pengawasan Prasarana Fasilitas Operasi Kereta Api (Pelayanan, Telekomunikasi dan Instalasi Listrik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					393.520.000	Kasubdi Fasilitas Operasi KA	
		Unit	27	Pengadaan Wessel R 54 untuk Wilayah Sumatera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27							40.381.622.000	PPK Perawatan	
		Unit	47	Pengadaan Wessel R 54 untuk Wilayah Jawa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47							68.259.651.000	PPK Perawatan	
		M2	10.000	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wessel di Jawa Bagian Tengah	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				829.150.000	PPK Perawatan
		M2	6.195	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wessel di Jawa Bagian Timur	6.195	6.195	6.195	6.195	6.195	6.195	6.195	6.195	6.195	6.195	6.195	6.195	6.195	6.195				617.307.000	PPK Perawatan
		M2	20.000	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wessel di Medan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				1.381.500.000	PPK Perawatan
		M2	10.000	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wessel di Palembang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				537.625.000	PPK Perawatan
		M2	8.000	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wessel di Kabupaten Baru	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				529.000.000	PPK Perawatan
		Dokumen	1	DED Pembangunan Jembatan KA Antara Rajapolah-Banjari Lintas Bandung-Kroya Tahap 3	0	0	0	0	1													2.348.139.000	PPK Fasilitas
Dokumen	1	DED Pembangunan Jalur Ganda KA antara Cicalengka-Karangasari Lintas Bandung-Kroya (Tahap 1)	0	0	0	1															1.579.741.000	PPK Fasilitas	
Dokumen	1	DED Pembangunan Jalur Ganda KA antara Karangasari-Cipenday Lintas Bandung-Kroya (Tahap 2)	0	0	0	1															1.676.071.000	PPK Fasilitas	
Dokumen	1	DED Pembangunan Jembatan untuk double track di BH 1049 antara Kesugihan-Maos Lintas Banjar-Kroya	0	0	0	1															1.351.768.000	PPK Fasilitas	
Dokumen	1	DED Pembangunan underpass Bukit Duri JPL 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1									1.408.311.000	PPK Fasilitas	
Dokumen	1	DED Inermoda KA ke Pelabuhan Garongkong dan Makassar New Port	0	0	1																1.107.706.000	PPK Fasilitas	



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab				
					Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12						
SK P1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	KK P1	JUALAH PKNYPKW/ SMPUL TRANSPORTASI YANG TERHUBUNG JALUR KERETA API	Dokumen	1	DED realisasi jalur KA Neras Sungai Limaui Sumbang	0	0	0	1,00								1.256.681.000	PKK Fasilitas			
				Dokumen	1	DED Pembangunan Jembatan dan Stasiun antara Neras Sungai Limaui	0	0	0	0	0	0	0	0	1					1.856.765.000	PKK Fasilitas	
				Dokumen	1	DED Shifting Frekuensi dan Peningkatan Radio Microwave Kereta Api	0	0	0	0	0	0	0	0	1						1.416.900.000	PKK Fasilitas
				Dokumen	1	DED Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api Lintas Tegai - Pekalongan dan Prapak - Chusawarto	0	0	0	0	0	0	0	0	1						1.434.600.000	PKK Fasilitas
				Dokumen	1	DED Perancangan Daerah Rawan Longsor Lintas Lahat-Lubuk Linggau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					2.312.120.000	PKK Fasilitas
				Dokumen	1	Jasa Konsultan Pembangunan Kereta Api Ringan/LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek (MNC 2020-2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	155.027.519.000	PKK Pembangunan LRT Jabodebek
				Rupiah	18.563.272.000	Tunggakan Jasa Konsultan Pembangunan Kereta Api Ringan/LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek	0	0	18.563.272.000												18.563.272.000	PKK Pembangunan LRT Jabodebek
				Dokumen	12	Tasert East-West Line Project Phase I (P&N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			89.595.230.000	PKK Pembangunan MRT East West
				Dokumen	12	Proyek Manajemen Unit PMU Program Pengabdian dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			35.093.192.000	PKK Pembangunan MRT East West
				Dokumen	1	Pemantauan RKL/RPL Pembangunan LRT Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					1.629.350.000	PKK Pembangunan LRT Sumsel
				Dokumen	1	Studi Manajemen Logistik Material Direktorat Prasarana Perkeretaapian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			3.338.580.000	PKK Perawatan
				Dokumen	1	Pengembangan Aplikasi Perizinan Perpotongan dan Peningkatan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain Berbasis Teknologi Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					1.102.530.000	PKK Fasilitas
				Dokumen	1	Pembangunan Aplikasi Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					1.160.280.000	PKK Fasilitas
Dokumen	1	Studi Pemetaan Program Pengabdian dan Pengembangan Informasi Kelakan Fasilitas Operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					1.376.265.000	PKK Fasilitas				
Dokumen	1	Studi Penyusunan Tata Cara Pengujian Persinyalan Sistem Otomatisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					1.853.293.000	PKK Fasilitas				
SK P2	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	KK P2.1	PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUKU DENGAN TDI	%	84,97	Kondisi Jalur Kereta Api yang sesuai Track Quality Index (TQI) dengan Kecepatan Minimum 80 Km/Jam	82,84	82,84	82,84	82,84	82,84	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	84,97		Kasubid Kelakan Jalur dan Bangunan KA dan PPK MD			
				KK P2.2	JUALAH PENINGKATAN SISTEM PERSINYALAN DAN TELEKOMUNIKASI PERKERETAAPIAN	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421.348.332.000	PKK Peningkatan Fasilitas Operasi KA Jabodebek	
						Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.501.028.000	PKK Peningkatan Fasilitas Operasi KA Jabodebek
KK P2.3	JUALAH PENINGKATAN GARDU TRAKSI DAN LKA PERKERETAAPIAN	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.450.840.000	PKK Peningkatan Fasilitas Operasi KA Jabodebek				
		Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SK P3	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	KK P3.1	PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA (MKN)	Km/sp	170,843	Panjang Jalur KA yang Dirawat Oleh PT KAI melalui dana IMD	0	0	0	0	0	0	0	42.711	42.711	42.711	170.843		PKK MD			
				Unit	345	Jumlah Jembatan KA yang Dirawat Oleh PT KAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	173	259	345		PKK MD	
				Unit	365	Jumlah Fasilitas Operasi KA yang Dirawat Oleh PT KAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	182	273	364		PKK MD	
				Stasiun	16	Perawatan Stasiun Milik Pemerintah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	16		PKK MD	
				Rupiah	345.134.766.133	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai IM	Rp 27.451.658.507	Rp 54.903.317.014	Rp 82.354.975.521	Rp 109.806.634.028	Rp 152.952.803.285	Rp 180.404.481.792	Rp 207.856.120.299	Rp 235.307.778.806	Rp 262.759.437.313	Rp 290.211.095.820	Rp 317.662.754.327	345.134.766.133				PKK MD
				Rupiah	348.341.744.548	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai IO	Rp 27.739.310.809	Rp 55.476.621.618	Rp 83.217.932.427	Rp 110.957.243.236	Rp 154.150.553.207	Rp 181.889.884.016	Rp 209.629.174.825	Rp 237.368.485.634	Rp 265.107.796.443	Rp 292.847.107.252	Rp 320.586.418.061	348.341.744.548				PKK MD
				Km/sp	9,436	Peningkatan Jalur Kereta Api Antara Tanggung - Koelegang Lintas Semarang - Solo di Wilayah Jawa Tengah (9.436 msp) Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)	0	0	9.436												13.783.883.000	PKK MD
				Rupiah	13.647.495.000	Peningkatan Jalur Kereta Api Antara Blumung - Tenggilis Lintas Semarang - Solo di Wilayah Jawa Tengah (10.732 msp) Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)	0	0	13.647.495.000												13.647.495.000	PKK MD
				Dokumen	1	Supervisi Peningkatan Jalur Kereta Api Di Wilayah Jawa Tengah (20.168 msp) Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)	0	0	1												1.028.655.000	PKK MD
				Unit	56.444	Pengadaan Bantalan Beton Termasuk Panambit Antara Kelanggan - Gundih Lintas Blumung - Solo di Wilayah Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.444		37.192.909.000	PKK MD
				Rupiah	16.847.983.000	Pengadaan Bantalan Beton Termasuk Panambit di Wilayah Jawa Bagian Tengah Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)	0	0	16.847.983.000												16.847.983.000	PKK MD
				Rupiah	1.158.082.000	Pengadaan Bantalan Kayu Termasuk Panambit di Wilayah Jawa Bagian Tengah Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)	0	0	1.158.082.000												1.158.082.000	PKK MD
				Unit	1	Pembongkaran/Rucat Jembatan Eksisting Btl-44 KA 19192 Intas Binja - Bestang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					8.284.140.000	PKK MD
Km/sp	0,261	Perluasan Kestabilan Lereng pada Badan Jalan di Wilayah Jawa dan Sumatera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,261		20.584.323.000	PKK MD				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab		
					Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12				
SK P3 Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	IKK P3.1 PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MLK NEGARA (MO)	Rupiah	11.141.533.000	Lanjutan pekerjaan perbaikan kestabilan lereng Miring Jembatan BH 355 dan Perawatan jalur KA KM 110 200 s.d KM 11 100 antara Cigemas	0	0	11.141.533.000											11.141.533.000	PPK MD	
		Rupiah	2.983.773.000	Lanjutan pekerjaan perbaikan kestabilan lereng outlet terowongan lampungan BH 415 KM 73 1 2 antara Cig - Lp lintas Bo-Yk	0	0	2.983.773.000											2.983.773.000	PPK MD	
		Rupiah	2.262.480.000	Pengadaan, Pemasangan dan Monitoring Jembatan Kereka Aga Perangkit Structure Health Monitoring System BH 1200 KM 263745 antara Man	0	0	2.262.480.000												2.262.480.000	PPK MD
		Unit	1	Pengadaan, Pemasangan dan Monitoring Terowongan Kereka Aga Dengan Perangkat Structure Health Monitoring System BH 152A KM 30777 an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	PPK MD
		Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 1 Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.616.050.000	PPK MD
		Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 2 Bandung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.376.500.000	PPK MD
		Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 3 Cirebon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.171.120.000	PPK MD
		Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 4 Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.262.260.000	PPK MD
		Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 5 Purwokerto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.221.680.000	PPK MD
		Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 6 Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.222.630.000	PPK MD
		Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 7 Medan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.321.710.000	PPK MD
		Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 8 Surabaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.543.360.000	PPK MD
		Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 9 Jember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.542.700.000	PPK MD
		Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre I Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.317.760.000	PPK MD
		Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre II Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.027.040.000	PPK MD
		Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre III Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.591.650.000	PPK MD
		Dokumen	1	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre IV Tanjung Karang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.360.750.000	PPK MD
		Dokumen	1	Survei dan Update Data pada Aplikasi MDPD di Wilayah BTP DKI Jakarta dan Banten Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jangka 2020-2021)	0	0	1												4.480.449.000	PPK MD
		Tiik	70	Keg Perbaikan Perintasan Sebidang Md Perkerasan Lentur Flexible Pavement di W/ DADP 1 Jakarta 70 Tiik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	35	52	70		8.433.517.000	PPK MD
		Tiik	40	Keg Perbaikan Perintasan Sebidang Md Perkerasan Lentur Flexible Pavement di W/ DADP 2 Bandung 40 Tiik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	21	31	42		3.850.128.000	PPK MD
		Tiik	14	Keg Perbaikan Perintasan Sebidang Md Perkerasan Lentur Flexible Pavement di W/ DADP 3 Cirebon 14 Tiik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	10	14		1.485.201.000	PPK MD
		Tiik	36	Keg Perbaikan Perintasan Sebidang Md Perkerasan Lentur Flexible Pavement di W/ DADP 4 Semarang 36 Tiik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	26,25	35		3.001.524.000	PPK MD
		Tiik	15	Keg Perbaikan Perintasan Sebidang Md Perkerasan Lentur Flexible Pavement di W/ DADP 5 Purwokerto 15 Tiik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	11,25	15		1.275.538.000	PPK MD
		Tiik	36	Keg Perbaikan Perintasan Sebidang Md Perkerasan Lentur Flexible Pavement di W/ DADP 6 Yogyakarta 30 Tiik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	22	30		2.755.984.000	PPK MD
		Tiik	28	Keg Perbaikan Perintasan Sebidang Md Perkerasan Lentur Flexible Pavement di W/ DADP 7 Medan 28 Tiik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14	21	28		2.520.235.000	PPK MD
		Tiik	37	Keg Perbaikan Perintasan Sebidang Md Perkerasan Lentur Flexible Pavement di W/ DADP 8 Surabaya 37 Tiik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,25	18	27	37		4.622.425.000	PPK MD
		Tiik	15	Keg Perbaikan Perintasan Sebidang Md Perkerasan Lentur Flexible Pavement di W/ DADP 9 Jember 15 Tiik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	11,25	15		1.574.966.000	PPK MD
		Tiik	30	Keg Perbaikan Perintasan Sebidang Md Perkerasan Lentur Flexible Pavement di W/ DIVRE I Sumatera Utara 30 Tiik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	22	30		2.528.674.000	PPK MD
Tiik	26	Keg Perbaikan Perintasan Sebidang Md Perkerasan Lentur Flexible Pavement di W/ DIVRE II Sumatera Barat 26 Tiik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13	19	26		2.059.162.000	PPK MD		
Tiik	30	Keg Perbaikan Perintasan Sebidang Md Perkerasan Lentur Flexible Pavement di W/ DIVRE III Palembang 30 Tiik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	22	30		3.020.075.000	PPK MD		
Tiik	28	Keg Perbaikan Perintasan Sebidang Md Perkerasan Lentur Flexible Pavement di W/ DIVRE IV Tanjungkarang 28 Tiik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14	21	28		2.405.547.000	PPK MD		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab			
					Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12					
SK P3	KK P3.2	JUMLAH SERTIFIKAT KELAKAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	Sertifikat	100	Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api	8	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	481.627.000	Kasubdt Kelakan Jalur dan Bangunan KA		
			Sertifikat	100	Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api	0	10	25	25	40	50	50	60	75	75	90	100	442.608.000	Kasubdt Kelakan Fasilitas KA		
			Laporan	1	Bimbingan Teknis Kelakan Jalur dan Bangunan Kereta Api	0	0	0	0	0	0	0	1						434.041.000	Kasubdt Kelakan Jalur dan Bangunan KA	
			Laporan	2	Bimbingan dan Koordinasi Teknis Kelakan Fasilitas Operasi Kereta Api	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2		511.894.000	Kasubdt Kelakan Fasilitas KA	
	KK P3.3	JUMLAH RUMBUAN NSPK BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN	Dokumen	7	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Spesifikasi Teknis, Kriteria dan Prosedur Jalur dan Bangunan KA beserta Persinyalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	652.905.000	Kasubdt Jalur dan Bangunan KA W I I Kasubdt Jalur dan Bangunan KA W II Kasubdt Fasilitas Operasi KA Kasubdt Kelakan Jalur dan Bangunan KA Kasubdt Kelakan Fasilitas Operasi KA		
			Dokumen	8	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Organisasi dan Tata Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	420.331.000	Kasubdt TU		
	KK P3.4	PERSENTASE PENETAPAN / PERSETUJUAN / PERLUNAN DIBIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN YANG TEPAT WAKTU	%	100	Persentase Penetapan / Penetapan Dokumen Teknis (izin Perpotongan) / Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain dan (izin Pembangunan) Prasarana Perkeretaapian PT Kereta Api Indonesia	0	0	25	25	25	50	50	50	50	75	75	75	100		Kasubdt Jalur dan Bangunan KA W I I Kasubdt Jalur dan Bangunan KA W II Kasubdt Fasilitas Operasi KA Kasubdt Kelakan Jalur dan Bangunan KA Kasubdt Kelakan Fasilitas Operasi KA	
			Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan	10	Jumlah Penetapan / Penetapan Dokumen Teknis (izin Perpotongan) / Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdt Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			Kasubdt Jalur dan Bangunan KA wilayah I	
			Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan	10	Jumlah Penetapan / Penetapan Dokumen Teknis (izin Perpotongan) / Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdt Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			Kasubdt Jalur dan Bangunan KA wilayah II	
			Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan	11	Jumlah Penetapan / Penetapan Dokumen Teknis (izin Perpotongan) / Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdt Fasilitas Operasi Kereta Api	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Kasubdt Fasilitas Operasi KA	
			Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan	12	Jumlah Penetapan / Penetapan Dokumen Teknis (izin Perpotongan) / Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdt Kelakan Jalur dan Bangunan Kereta Api	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Kasubdt Kelakan Jalur dan Bangunan KA	
			Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan	10	Jumlah Penetapan / Penetapan Dokumen Teknis (izin Perpotongan) / Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdt Kelakan Fasilitas Operasi Kereta Api	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			Kasubdt Kelakan Fasilitas Operasi KA	
	SK P4	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	KK P4.1	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	%	97,89	Penyerapan Anggaran Saker PPPPKA	6,43	8,11	13,02	65,59	68,39	71,33	77,35	79,23	80,99	87,44	88,87	97,89		PPK LRT Sumsel, PPK MO, PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Pembangunan LRT Jabodebek, PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek, PPK pembangunan MRT East West
					%	99,73	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Fasilitas	2,22	4,44	13,79	16,01	30,47	49,96	52,2	54,43	73,94	76,16	80,22	99,73		99,73
%					99,21	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Perawatan	0,74	17,82	48,36	48,69	79,65	96,53	97,32	97,65	98,18	98,34	98,89	99,21		99,21	PPK Perawatan
%					99,96	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Pembangunan LRT Sumsel	0,007	0,014	0,304	98,794	99,23	99,237	99,59	99,6	99,96	99,97	99,97	99,98		99,98	PPK LRT Sumsel
%					100	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Pembangunan LRT Jabodebek	7,66	23,4	31,06	38,72	46,38	54,04	61,7	69,36	77,02	84,68	92,34	100		100	PPK Pembangunan LRT Jabodebek
%					96	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek	8,33	16,66	24,99	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,3	91,63	100		100	PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek
%					99	Penyerapan Anggaran Kantor PPK MO	0	8,64	17,27	25,91	34,55	43,18	51,82	60,45	69,09	77,73	86,36	100		100	PPK MO
%					99	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Pembangunan MRT East West	4	12	23	29	34	46	54	62	71	79	87	99		99	PPK pembangunan MRT East West
%					89	Penyerapan Anggaran kantor PPK Peningkatan Fasilitas Operasi KA Jabodebek	0	0	14	14	17	17	34	34	37	58	58	80		80	PPK Peningkatan Fasilitas Operasi KA Jabodebek
Laporan					1	Kegiatan Operasional Pengadaan Lahan LRT Jabodebek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1.500.000.000	PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek
Laporan					1	Rapat Evaluasi Hasil Kinerja Saker Prasarana bersama Direktorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		175.000.000	Kasubdt TU
Laporan					1	Rakornis Direktorat Prasarana Perkeretaapian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		759.865.000	Kasubdt TU
Laporan					1	Layanan Perkaroran : Kantor LRT Sumsel, Kantor MO, Kantor Perawatan, Kantor Fasilitas, Subdt TU, Kantor LRT Jabodebek, Kantor Pengadaan Tanah LRT Jabodebek, Kantor MRT East West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		19.607.399.000	Kantor LRT Sumsel, Kantor MO, Kantor Perawatan, Kantor Fasilitas, Subdt TU, Kantor LRT Jabodebek, Kantor Pengadaan Tanah LRT Jabodebek, Kantor MRT East West

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab		
					Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12				
SK P4 Terejadinya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	KK P4.1 PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	Laporan	1	Layanan Internal : a. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Kantor Pembangunan LRT Jabodetabek, Kantor MO, Kantor Fasilitas, Kantor Perawatan, MRT-East West dan Subbag Tata Usaha), b. Fasilitas Perkantoran (Kantor Pembangunan LRT Jabodetabek, Kantor MO, Kantor Fasilitas, Kantor Perawatan, MRT East West dan Subbag TU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.223.676.000	Kantor LRT Sumsel, Kantor MO, Kantor Perawatan, Kantor Fasilitas, Subbag TU, Kantor LRT Jabodetabek, Kantor Pengadaan Tanah LRT Jabodetabek, Kantor MRT East West		
				Layanan Dukungan Manajemen Satek : a. Administrasi Kegiatan Pelelangan b. Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor LRT Sumsel, Kantor MO, Kantor Perawatan, Kantor Fasilitas dan Kantor Pembangunan LRT Jabodetabek, Kantor MRT East West), c. Sistem Akuntansi Instansi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.727.978.000	Kantor LRT Sumsel, Kantor MO, Kantor Perawatan, Kantor Fasilitas, Subbag TU, Kantor LRT Jabodetabek, Kantor Pengadaan Tanah LRT Jabodetabek, Kantor MRT East West
				Penyelenggaraan Kegiatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan, 10) Penyusunan, Pelaporan Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021	3	4	5	6	6	6	8	8	8	8	9	10	10	0	410.383.000	Kasubag TU
				Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Sub-Bagian Tata Usaha Direktorat Prasarana Perkeretaapian 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.120.832.000	Kasubag TU
KK P4.2 PENERIMAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN	Rupiah	1.739.440.000	1.739.440.000	Pendapatan Pengujian, Serifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan & Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	144.953.000	289.908.000	434.859.000	579.812.000	724.765.000	869.718.000	1.014.671.000	1.159.624.000	1.304.577.000	1.449.530.000	1.594.483.000	1.739.440.000	0	Bendahara Penerima		

Jakarta,

2021

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN



**HERU WISNU WIBOWO**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650710 199003 1 002

**LAMPIRAN RENCANA KINERJA KEGIATAN  
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN  
TAHUN 2021**

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
<b>JUMLAH PKN/PKW/ SIMPUL TRANSPORTASI YANG TERHUBUNG JALUR KERETA API</b>							
1	<b>Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur KA</b>						
	PKN/PKW/Simpul Transportasi yang terhubung Jalur KA Wilayah I: Jabodebek, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Cirebon, Solo Madiun, Purwokerto, Malang, Tegal, Sukabumi, Rongkasbitung, Serang, Cilegon, Probolinggo, Bandara Soetta, Bandara Adi Soemarmo, Pelabuhan Tj Priok, Pelabuhan Merak, Barra, Kulon Progo, Pelabuhan Tj mas	23	Lokasi				Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah I
	PKN/PKW/Simpul Transportasi yang terhubung Jalur KA Wilayah II: Medan, Padang, Palembang, Lampung, Binjai, Pematang Siantar, Lahat, Baturaja, Prabumulih, Tebing Tinggi, Rantauprapat, Bandara Kualanamu, Bandara BIM, Bandara Sultan Mahmud Baharudin, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Sungai Kertapati	16	Lokasi				Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah II
2	Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan			2.509.144.727.000	Rupiah	2.509.144.727.000	PPK Pembangunan LRT Sumatera Selatan
3	Konsultansi Supervisi Prasarana Kereta Api Ringan Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan			1	Dokumen	5.856.929.000	PPK Pembangunan LRT Sumatera Selatan
4	Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung			1	Sertifikat	2.080.000.000	PPK Pembangunan LRT Sumatera Selatan
5	Pengadaan dan pemasangan SHMS untuk Jalur Elevated LRT Sumatera Selatan	23	Km			26.841.530.000	PPK Pembangunan LRT Sumatera Selatan
<b>JUMLAH</b>		<b>39,00</b>	<b>Lokasi</b>			<b>2.543.923.186.000</b>	
<b>JUMLAH KEGIATAN BIMBINGAN DAN KOORDINASI TEKNIS</b>							
1	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	2	Laporan			383.459.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
2	Bimbingan Teknis, serta Koordinasi Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	2	Laporan			428.903.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil II
3	Bimbingan Teknis Fasilitas Operasi Kereta Api (Persinyalan, Telekomunikasi dan Instalasi Listrik)	1	Laporan			467.442.000	Kasubdit Fasilitas Operasi KA
<b>JUMLAH</b>		<b>5,00</b>	<b>Laporan</b>			<b>1.279.804.000</b>	
<b>JUMLAH KEGIATAN PEMERIKSAAN RUTIN</b>							
1	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	12	Laporan			1.000.193.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
2	Monitoring dan Evaluasi Jalur dan Bangunan KA Wilayah II	12	Laporan			441.091.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil II
3	Pemeriksaan dan Pengawasan Prasarana Fasilitas Operasi Kereta Api (Persinyalan, Telekomunikasi dan Instalasi Listrik)	12	Laporan			393.520.000	Kasubdit Fasilitas Operasi KA
<b>JUMLAH</b>		<b>36</b>	<b>Laporan</b>			<b>1.834.804.000</b>	
<b>PENGADAAN WESEL</b>							
1	Pengadaan Wesel R 54 untuk Wilayah Sumatera			27	Unit	40.381.622.000	PPK Perawatan

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
2	Pengadaan Wesel R 54 untuk Wilayah Jawa			47	Unit	68.259.651.000	PPK Perawatan
<b>JUMLAH</b>				<b>74</b>	<b>Unit</b>	<b>108.641.273.000</b>	
	Kegiatan Sewa Lahan	54.195	M2				PPK Perawatan
a	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Jawa Bagian Tengah	10.000	M2			829.150.000	PPK Perawatan
b	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Jawa Bagian Timur	6.195	M2			617.307.000	PPK Perawatan
c	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Medan	20.000	M2			1.391.500.000	PPK Perawatan
d	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Palembang	10.000	M2			537.625.000	PPK Perawatan
e	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Kabupaten Barru	8.000	M2			529.000.000	PPK Perawatan
<b>JUMLAH</b>		<b>54.195</b>	<b>M2</b>			<b>3.904.582.000</b>	
<b>JUMLAH PENGADAAN WESEL dan SEWA LAHAN</b>						<b>112.545.855.000</b>	
<b>PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS</b>							
1	DED Pembangunan Jembatan KA Antara Rajapolah-Banjar Lintas Bandung-Kroya Tahap 3	1	Dokumen			2.348.139.000	PPK Fasilitas
2	DED Pembangunan Jalur Ganda KA antara Cicalengka-Karangsari lintas BandungKroya (Tahap 1)	1	Dokumen			1.579.741.000	PPK Fasilitas
3	DED Pembangunan Jalur Ganda KA antara Karangsari-Cipendeuy lintas BandungKroya (Tahap 2)	1	Dokumen			1.676.071.000	PPK Fasilitas
4	DED Pembangunan Jembatan untuk double track di BH 1549 antara Kesugihan-Maos lintas Banjar-Kroya	1	Dokumen			1.351.768.000	PPK Fasilitas
5	DED Pembangunan underpass Bukit Duri JPL 14	1	Dokumen			1.408.311.000	PPK Fasilitas
6	DED Intermoda KA ke Pelabuhan Garongkong dan Makassar New Port	1	Dokumen			1.107.706.000	PPK Fasilitas
7	DED reaktivasi jalur KA Naras Sungai Limau, Sumbar	1	Dokumen			1.256.681.000	PPK Fasilitas
8	DED Pembangunan Jembatan dan Stasiun antara Naras Sungai Limau	1	Dokumen			1.856.765.000	PPK Fasilitas
9	DED Shifting Frekuensi dan Peningkatan Radio Microwave Kereta Api	1	Dokumen			1.416.900.000	PPK Fasilitas
10	DED Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda Kereta Api Lintas Tegal - Pekalongan dan Prupuk -Purwokerto	1	Dokumen			1.434.600.000	PPK Fasilitas
11	DED Penanganan Daerah Rawan Longsor Lintas Lahat-Lubuk Linggau	1	Dokumen			2.312.120.000	PPK Fasilitas
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>Dokumen</b>			<b>17.748.802.000</b>	
<b>PENYUSUNAN KAJIAN KEBIJAKAN DAN STUDI PENDUKUNG LAINNYA DI BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN</b>							

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	Jasa Konsultan Pembangunan Kereta Api Ringan/LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek (MYC 2020-2021)	1	Dokumen			155.027.519.000	PPK Pembangunan LRT Jabodebek
2	Tunggakan Jasa Konsultan Pembangunan Kereta Api Ringan/LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek			18.563.272.000	Rupiah	18.563.272.000	PPK Pembangunan LRT Jabodebek
3	Engineering Services For Jakarta Mass rapid Transit East-West Line Project Phase I (PHLN)	12	Dokumen			89.505.230.000	MRT East West
4	Proyek Manajemen Unit PMU Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	12	Dokumen			35.093.192.000	MRT East West
5	Pemantauan RKL/RPL Pembangunan LRT Sumatera Selatan	1	Dokumen			1.629.350.000	PPK Pembangunan LRT Sumatera Selatan
6	Studi Manajemen Logistik Material Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1	Dokumen			3.338.580.000	PPK Perawatan
7	Pengembangan Aplikasi Perizinan Perpotongan dan Persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain Berbasis Teknologi Informasi	1	Dokumen			1.102.530.000	PPK Fasilitas
8	Pembangunan Aplikasi Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	1	Dokumen			1.160.280.000	PPK Fasilitas
9	Studi Pemetaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Kelaikan Fasilitas Operasi	1	Dokumen			1.376.265.000	PPK Fasilitas
10	Studi Penyusunan Tata Cara Pengujian Persinyalan Sistem Otomatisasi	1	Dokumen			1.853.293.000	PPK Fasilitas
<b>JUMLAH</b>		<b>31</b>	<b>Dokumen</b>			<b>308.649.511.000</b>	
<b>PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI</b>							
1	Kondisi Jalur Kereta Api yang sesuai Track Quality Index (TQI) dengan Kecepatan Minimum 80 Km/Jam	84,97	%				PPK IMO, Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
<b>JUMLAH</b>		<b>84,97</b>	<b>%</b>				
<b>JUMLAH PENINGKATAN SISTEM PERSINYALAN DAN TELEKOMUNIKASI PERKERETAAPIAN</b>							
1	Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Perkeretaapian pada Lintas Jatinegara-Bogor-dan Manggarai-Jakarta Kota (myc 2020-2022)	-	Unit			421.348.332.000	PPK Peningkatan FASOP KA Jabodebek
2	Supervisi Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada Lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakartakota (MYC 2020-2022)			-	Dokumen	11.501.028.000	PPK Peningkatan FASOP KA Jabodebek
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>Unit</b>	<b>-</b>	<b>Dokumen</b>	<b>432.849.360.000</b>	
<b>JUMLAH PENINGKATAN GARDU TRAKSI DAN LAA PERKERETAAPIAN</b>							
1	Peningkatan Gardu Traksi dan Listrik Aliran Atas Perkeretaapian pada Lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakartakota (MYC 2020-2022)	-	Unit			85.450.640.000	PPK Peningkatan FASOP KA Jabodebek
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>Unit</b>			<b>85.450.640.000</b>	
<b>JUMLAH PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA (IMO)</b>							
<b>PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA (IMO)</b>						<b>1.231.119.660.000</b>	<b>PPK IMO</b>
1	Panjang Jalur KA yang Dirawat Oleh PT KAI melalui dana IMO	170,843	Km'sp				PPK IMO

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
2	Peningkatan Jalur Kereta Api Antara Tanggung - Kedungjati Lintas Semarang - Solo di Wilayah Jawa Tengah (9.436 msp) Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)	9,436	Km'sp			13.783.883.000	PPK IMO
3	Peningkatan Jalur Kereta Api Antara Brumbung - Tanggung Lintas Semarang - Solo di Wilayah Jawa Tengah (10.732 msp) Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)			13.647.495.000	Rupiah	13.647.495.000	PPK IMO
4	Supervisi Peningkatan Jalur Kereta Api Di Wilayah Jawa Tengah (20.168 msp) Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)			1	Dokumen	1.028.655.000	PPK IMO
5	Pengadaan Bantalan Beton Termasuk Penambat Antara Kedungjati - Gundih Lintas Brumbung - Solo di Wilayah Jawa Tengah			56.444	Unit	37.192.909.000	PPK IMO
6	Pengadaan Bantalan Beton Termasuk Penambat di Wilayah Jawa Bagian Tengah Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)			16.847.983.000	Rupiah	16.847.983.000	PPK IMO
7	Pengadaan Bantalan Kayu Termasuk Penambat di Wilayah Jawa Bagian Tengah Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)			1.158.082.000	Rupiah	1.158.082.000	PPK IMO
8	Pembongkaran/Rucat Jembatan Eksisting BH.44 KM.19192 lintas Binjai - Besitang			1	Unit	8.284.140.000	PPK IMO
9	Perkuatan Kestabilan Lereng pada Badan Jalan di Wilayah Jawa dan Sumatera	0,261	Km'sp			20.584.323.000	PPK IMO
10	Lanjutan pekerjaan perbaikan kestabilan lereng Mntrg Jembatan BH 355 dan Perawatan jalur KA KM 110 200 s.d KM 11 100 antara Ciganea			11.141.533.000	Rupiah	11.141.533.000	PPK IMO
11	Lanjutan pekerjaan perbaikan kestabilan lereng outlet terowongan lampegan BH 415 KM 73 1 2 antara Crg - Lp lintas Bo-Yk			2.983.773.000	Rupiah	2.983.773.000	PPK IMO
12	Pengadaan, Pemasangan dan Monitoring Jembatan Kereta Api Perangkat Structure Health Monitoring System BH.1290 KM.283745 antara Man			2.262.480.000	Rupiah	2.262.480.000	PPK IMO
13	Pengadaan, Pemasangan dan Monitoring Terowongan Kereta Api Dengan Perangkat Structure Health Monitoring System BH.152A KM.30777 an			1	Unit	4.000.000.000	PPK IMO
15	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 1 Jakarta			1	Dokumen	3.616.050.000	PPK IMO
16	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 2 Bandung			1	Dokumen	2.376.500.000	PPK IMO
17	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 3 Cirebon			1	Dokumen	2.171.120.000	PPK IMO
18	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 4 Semarang			1	Dokumen	2.262.260.000	PPK IMO
19	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 5 Purwokerto			1	Dokumen	2.221.680.000	PPK IMO
20	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 6 Yogyakarta			1	Dokumen	2.222.630.000	PPK IMO
21	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 7 Madiun			1	Dokumen	2.321.710.000	PPK IMO
22	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 8 Surabaya			1	Dokumen	2.543.360.000	PPK IMO



NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
23	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Daop 9 Jember			1	Dokumen	2.542.700.000	PPK IMO
24	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre I Sumatera Utara			1	Dokumen	2.317.760.000	PPK IMO
25	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre II Sumatera Barat			1	Dokumen	2.027.040.000	PPK IMO
26	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre III Sumatera Selatan			1	Dokumen	2.591.650.000	PPK IMO
27	Jasa Konsultansi Management Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Wilayah Divre IV Tanjung Karang			1	Dokumen	2.360.750.000	PPK IMO
28	Survei dan Update Data pada Aplikasi MOP5 di Wilayah BTP DKI Jakarta dan Banten Tahun Anggaran 2021 (Tahun Jamak 2020-2021)			1	Dokumen	4.460.449.000	PPK IMO
<b>JUMLAH</b>		<b>180,540</b>	<b>Km'sp</b>			<b>168.950.915.000</b>	
<b>JUMLAH PERAWATAN / REHABILITASI FASILITAS OPERASI KERETA API</b>							
1	Jumlah Fasilitas Operasi KA yang Dirawat Oleh PT KAI	364	Unit				PPK IMO
<b>JUMLAH</b>		<b>364</b>	<b>Unit</b>			-	
<b>JUMLAH PERAWATAN / REHABILITASI JEMBATAN KERETA API</b>							
1	Jumlah Jembatan KA yang Dirawat Oleh PT KAI	345	Unit				PPK IMO
<b>JUMLAH</b>		<b>345</b>	<b>Unit</b>			-	
<b>JUMLAH PERAWATAN / REHABILITASI STASIUN KERETA API</b>							
1	Perawatan Stasiun Milik Pemerintah	16	Stasiun				PPK IMO
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	<b>Stasiun</b>			-	
<b>PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI IM dan IO PT KERETA API INDONESIA</b>							
1	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai IM	345.134.766.133,000	Rupiah				PPK IMO
2	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai IO	348.341.744.548,000	Rupiah				PPK IMO
<b>JUMLAH</b>		<b>693.476.510.681,000</b>	<b>Rupiah</b>				
<b>PERAWATAN / REHABILITASI PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API</b>							
	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 1 Jakarta 70 Titik	70	Titik			8.433.517.000	PPK IMO
	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 2 Bandung 42 Titik	42	Titik			3.850.128.000	PPK IMO

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 3 Cirebon 14 Titik	14	Titik			1.485.201.000	PPK IMO
	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 4 Semarang 35 Titik	35	Titik			3.001.524.000	PPK IMO
	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 5 Purwokerto 15 Titik	15	Titik			1.275.538.000	PPK IMO
	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 6 Yogyakarta 30 Titik	30	Titik			2.755.984.000	PPK IMO
	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 7 Madiun 28 Titik	28	Titik			2.520.235.000	PPK IMO
	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 8 Surabaya 37 Titik	37	Titik			4.622.425.000	PPK IMO
	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DAOP 9 Jember 15 Titik	15	Titik			1.574.966.000	PPK IMO
	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DIVRE I Sumatera Utara 30 Titik	30	Titik			2.526.674.000	PPK IMO
	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DIVRE II Sumatera Barat 26 Titik	26	Titik			2.059.162.000	PPK IMO
	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DIVRE III Palembang 30 Titik	30	Titik			3.020.075.000	PPK IMO
	Keg Perbaikan Perlintasan Sebidang Mtd Perkerasan Lentur Flexible Pavement di Wil DIVRE IV Tanjungkarang 28 Titik	28	Titik			2.405.547.000	PPK IMO
<b>JUMLAH</b>		<b>400</b>	<b>Titik</b>			<b>39.530.976.000</b>	
<b>JUMLAH SERTIFIKAT KELAIKAN PRASARANA PERKERETAAPIAN</b>							
1	Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api	105	Sertifikat			481.627.000	Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
2	Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api	100	Sertifikat			442.609.000	Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
<b>JUMLAH</b>		<b>205</b>	<b>Sertifikat</b>			<b>924.236.000</b>	
<b>JUMLAH KEGIATAN BIMBINGAN DAN KOORDINASI TEKNIS</b>							
1	Bimbingan Teknis Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api	1	Laporan			434.041.000	Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
2	Bimbingan dan Koordinasi Teknis Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	2	Laporan			511.894.000	Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>Laporan</b>			<b>945.935.000</b>	
<b>JUMLAH RUMUSAN NSPK BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN</b>							
1	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Spesifikasi Teknis, Kriteria dan Prosedur Jalur dan Bangunan KA beserta Persinyalan	7	Dokumen				Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah I
	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Spesifikasi Teknis, Kriteria dan Prosedur Subdit 1	1	Dokumen				

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Spesifikasi Teknis, Kriteria dan Prosedur Subdit 2	2	Dokumen			652.905.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah II
	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Spesifikasi Teknis, Kriteria dan Prosedur Subdit 3	2	Dokumen				Kasubdit Fasilitas Operasi KA
	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Spesifikasi Teknis, Kriteria dan Prosedur Subdit 4	2	Dokumen				Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Organisasi dan Tata Kerja	5	Dokumen			420.331.000	Kasubbag TU
<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>	<b>Dokumen</b>			<b>1.073.236.000</b>	

**PERSENTASE PENETAPAN / PERSETUJUAN / PERIJINAN DIBIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN YANG TEPAT WAKTU**

1	Persentase Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain dan ijin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian PT Kereta Api Indonesia	100	%				Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil II Kasubdit Fasilitas Operasi KA Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
a	Jumlah Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I	10	Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan				Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
b	Jumlah Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	10	Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan				Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil II
c	Jumlah Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan / Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan LainSubdit Fasilitas Operasi Kereta Api	11	Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan				Kasubdit Fasilitas Operasi KA
d	Jumlah Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan LainSubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api	12	Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan				Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
e	Jumlah Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan/ Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain Subdit Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	10	Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan				Kasubdti Kelaikan Fasilitas Operasi KA
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>	<b>%</b>			<b>-</b>	

**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN**

1	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan & Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.739.440.000	Rupiah				Bendahara Penerimaan
<b>JUMLAH</b>		<b>1.739.440.000</b>	<b>Rupiah</b>				

**PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN**

1	Penyerapan Anggaran Satker PPPKA	97,89	%				Kuasa Pengguna Anggaran, PPK Perawatan Kasubbag TU
	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Fasilitas	99,73	%				PPK Fasilitas
	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Perawatan	99,21	%				PPK Perawatan

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Pembangunan LRT Sumsel	99,98	%				PPK LRT Sumatera Selatan
	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Pembangunan LRT Jabodebek	100	%				PPK LRT Jabodebek
	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek	100	%				PPK Pengadaan LRT Jabodebek
	Penyerapan Anggaran Kantor PPK IMO	95	%				PPK IMO
	Penyerapan Anggaran Kantor PPK Pembangunan MRT East West	99	%				PPK MRT East west
	Penyerapan Anggaran kantor PPK Peningkatan Fasilitas Operasi KA Jabodebek	80	%				PPK Peningkatan FASOP KA Jabodebek
2	Kegiatan Operasional Pengadaan Lahan LRT Jabodebek	1	Laporan			1.500.000.000	PPK Tanah LRT Jabodebek
3	Rapat Evaluasi Hasil Kinerja Satker Prasarana bersama Direktorat	1	Laporan			175.000.000	PPK Perawatan, Kasubbag TU
4	Rakornis Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1	Laporan			759.865.000	PPK Perawatan, Kasubbag TU
5	Layanan Perkantoran : (Kantor LRT Sumsel, Kantor IMO, Kantor Perawatan, Kantor Fasilitas, Subbag TU, Kantor LRT Jabodebek, Kantor Pengadaan Tanah LRT Jabodebek, MRT East West)	1	Laporan			19.607.399.000	PPK LRT Sumsel, PPK IMO, PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Pembangunan LRT Jabodebek, PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek, PPK MRT East West dan Kasubbag TU
	a Layanan Perkantoran (Kantor LRT Sumsel)					996.327.000	PPK LRT Sumsel
	b Layanan Perkantoran (Kantor IMO)					4.715.364.000	PPK IMO
	c Layanan Perkantoran (Kantor Perawatan)					2.635.723.000	PPK Perawatan
	d Layanan Perkantoran (Kantor Fasilitas)					5.856.491.000	PPK Fasilitas
	e Layanan Perkantoran (Subbag TU)					567.341.000	Kasubbag TU
	f Layanan Perkantoran (Kantor LRT Jabodebek)					1.817.203.000	PPK Pembangunan LRT Jabodebek
	g Layanan Perkantoran (Kantor Pengadaan Tanah LRT Jabodebek)					355.150.000	PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek
	Layanan Perkantoran (Kantor MRT East West)					2.663.800.000	PPK MRT East West
6	Layanan Internal : a. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Kantor Pembangunan LRT Jabodebek, Kantor IMO, Kantor Fasilitas, Kantor Perawatan, Kantor MRT East West dan Subbag Tata Usaha), b. Fasilitas Perkantoran (Kantor Pembangunan LRT Jabodebek, Kantor IMO, Kantor Fasilitas dan Kantor Perawatan, Kantor MRT East West dan Subbag Tata Usaha)	1	Laporan			3.223.676.000	PPK LRT Sumsel, PPK IMO, PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Pembangunan LRT Jabodebek, PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek, Kantor MRT East West dan Kasubbag TU
	a Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi						
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Pembangunan LRT Jabodebek)					120.437.000	PPK Pembangunan LRT Jabodebek, Kasubbag TU

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (IMO)					165.575.000	PPK IMO, Kasubbag TU
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Fasilitas)					300.000.000	PPK Fasilitas, Kasubbag TU
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Perawatan)					250.000.000	PPK Perawatan, Kasubbag TU
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (MRT-East West)					200.000.000	PPK MRT East West
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Subbag Tata Usaha)					850.000.000	Kasubbag TU
	<b>b Fasilitas Perkantoran</b>						
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Pembangunan LRT Jabodebek					83.239.000	PPK Pembangunan LRT Jabodebek
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran IMO					34.425.000	PPK IMO
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Fasilitas					300.000.000	PPK Fasilitas
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Perawatan					20.000.000	PPK Perawatan
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran MRT East West					400.000.000	PPK MRT East West
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Subbag TU					500.000.000	Kasubbag TU
7	Layanan Dukungan Manajemen Satker : a. Administrasi Kegiatan Pelelangan b. Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor LRT Sumsel, Kantor IMO, Kantor Perawatan, Kantor Fasilitas, Kantor Pembangunan LRT Jabodebek dan kantor MRT East West), c. Sistem Akuntansi Instansi	2	Laporan/Dokumen			13.727.978.000	PPK LRT Sumsel, PPK IMO, PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Pembangunan LRT Jabodebek, PPK Pengadaan Tanah LRT Jabodebek, PPK MRT East West dan Kasubbag TU
	<b>a Administrasi Kegiatan Pelelangan</b>					<b>1.852.906.000</b>	
	<b>b Administrasi Kegiatan Lainnya</b>						
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor LRT Sumsel)					1.184.930.000	PPK LRT Sumsel
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor IMO)					2.127.400.000	PPK IMO
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Perawatan)					1.578.471.000	PPK Perawatan
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Fasilitas)					2.195.622.000	PPK Fasilitas
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Pembangunan LRT Jabodebek)					827.800.000	PPK Pembangunan LRT Jabodebek
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor MRT East West)					3.043.457.000	PPK MRT East West
	<b>c Sistem Akuntansi Instansi</b>					917.392.000	PPK Fasilitas

NO	KEGIATAN	TARGET				Nilai Pagu	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
8	Penyelenggaraan Kegiatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Penyusunan, Pelaporan Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021	10	Dokumen			410.383.000	Kasubbag TU
9	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1	Laporan			1.120.832.000	Kasubbag TU
<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>	<b>Dokumen/Laporan</b>			<b>40.525.133.000</b>	
<b>Anggaran Tahun 2021 Kegiatan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api</b>						<b>Rp</b>	<b>4.987.352.053.000</b>